



## KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI NEGARA UPPER MIDDLE INCOME ASEAN

Ratu Eva Febriani • Aning Kesuma Putri • Muhammad Havizd • Marwan • Lessita

**Abstract.** *In the last period, a lot of literature has revealed that corruption and economic growth are important factors in influencing income inequality. In this study, the researcher strongly believes that there is a relationship between corruption, economic growth and income inequality. The scope of this study focuses on three middle-income countries in the ASEAN region in the 2010-2018 period. To analyze the problem used an analytical tool of panel data regression. The results come from fixed effect model as the best model, state that corruption has a significant effect on income inequality, and so does economic growth which has a significant positive effect on income inequality in three upper middle-income countries in ASEAN.*

**Keywords:** *Corruption, Economic Growth, Income Inequality, ASEAN.*

©2022 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

### PENDAHULUAN

Ancaman bahaya dari ketimpangan pendapatan sudah di depan mata. Berbagai studi memperlihatkan bahwa ketimpangan merupakan katalis dari konflik sosial dan politik. Meskipun sejauh ini ketimpangan belum sampai menimbulkan keguncangan sosial dan politik, namun ketimpangan meracuni persepsi masyarakat terhadap berbagai reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mereka menjadi lebih resisten (Coudouel, Dani, dan Paternostro, 2006). Todaro dan Smith (2006), menyebutkan bahwa ketimpangan akan memberikan beberapa dampak, diantaranya dapat menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan distribusi pendapatannya yang umumnya tidak adil pada kasus ketimpangan

Ratu Eva Febriani(✉)

Universitas Bengkulu

Email : [ratuevafebriani@unib.ac.id](mailto:ratuevafebriani@unib.ac.id)

Aning Kesuma Putri

Universitas Bangka Belitung

Email : [aning@ubb.ac.id](mailto:aning@ubb.ac.id)

Muhammad Havizd

Universitas Bengkulu

Email: [Mhvizd99@gmail.com](mailto:Mhvizd99@gmail.com)

Marwan

Universitas Bengkulu

Email : [marwanardian27@gmail.com](mailto:marwanardian27@gmail.com)

Lessita

Universitas Bengkulu

Email : [lessita0704@gmail.com](mailto:lessita0704@gmail.com)

pendapatan yang ekstrim. Jika ini dibiarkan maka tujuan utama dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit dicapai.

Pembangunan ekonomi yang gencar dilakukan oleh berbagai negara tidak terkecuali negara-negara berpendapatan menengah atas di ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Dipercaya bahwa kemajuan suatu negara jika mampu mencapai taraf pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di ketiga negara tersebut malah membuka jurang yang lebih dalam bagi distribusi pendapatan yang merata.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat dinikmati oleh semua kelompok pendapatan masyarakat. Ketidaksetaraan pendapatan, yang berdampak buruk pada standar hidup orang adalah masalah beragam di sebagian besar negara baik negara maju maupun berkembang. Ketimpangan pendapatan yang semakin lebar dan masih belum bisa di atasi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa hanya masyarakat tertentu saja yang dapat menikmati pertumbuhan yang pesat ini.

Sesungguhnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan masih belum dapat ditegaskan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan (Forbes, 2000; Rubin & Segal, 2015; Wahiba & El Weriemmi, 2014). Frank (2009) memperkuat pembuktian bahwa pertumbuhan ekonomi lebih cepat jika didorong oleh ketimpangan yang tinggi. Sebaliknya, Panizza (2002) membuktikan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan begitupula dengan hasil penelitian dari Cingano (2014) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengarahkan jarak lebih besar dalam pendapatan masyarakat. Sementara Huang, dkk (2015) melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dapat positif dan negatif.

Di sisi yang berbeda, kue ekonomi yang hanya bisa dinikmati secara bebas oleh kelompok-kelompok tertentu membuat perilaku korupsi semakin bersemi. Korupsi seperti penyakit kusta yang menggerogoti tubuh manusia, namun dalam hal ini korupsi menjadi borok bagi perekonomian. Dartanto, dkk (2016) menyatakan dalam hasil kajiannya bahwa dengan pemberantasan korupsi akan mendorong ketimpangan pendapatan di Indonesia menurun disebabkan oleh terhentinya transfer sumber daya dari kelompok miskin ke kelompok kaya. Fenomena korupsi merupakan permasalahan yang banyak dihadapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Korupsi telah menimbulkan kerugian di berbagai sektor baik sektor publik maupun sektor swasta.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencatat, korupsi adalah kejahatan serius yang dapat melemahkan pembangunan sosial dan ekonomi disemua lapisan masyarakat. Baik negara, wilayah, maupun masyarakat dirasa tidak kebal terhadap kejahatan ini (Tirto.id, 2017). Menurut laporan UNDP Tahun 2013 dengan tajuk '*Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries*' menyatakan ketimpangan pendapatan hampir di semua negara di dunia dan masih sulit untuk diatasi secara massif dan terstruktur sehingga kesenjangan semakin melebar dan kesenjangan pendapatan yang ada masih belum dapat dikurangi.

Korupsi dan ketimpangan memberikan sumbangan negatif terhadap kinerja ekonomi suatu negara, tidak terkecuali negara-negara *upper middle income* di ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Diperlukan kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diikuti dengan pemerataan pendapatan, sehingga tidak adanya jurang pendapatan yang semakin lebar sebagai akibat adanya korupsi di negara-negara tersebut. Beberapa penelitian (Mo, 2001; Meon dan Sekkat, 2005; Fisman dan Miguel,



2008; Yamamura, Andres dan Katsaiti, 2012) menemukan korupsi berdampak terhadap bidang kehidupan masyarakat baik bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sumah (2018) menemukan dampak korupsi terhadap ekonomi (juga pada masyarakat luas), diantaranya, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi operasional bisnis dan investasi serta mendorong ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Selain itu, korupsi juga merupakan faktor penentu utama kemiskinan, karena tingginya korupsi dapat memperburuk kondisi hidup orang miskin dan mendistorsi seluruh proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sektor-sektor publik (Negin, dkk 2010). Dengan memperburuk kondisi kemiskinan maka akan membuka peluang besar terjadinya ketimpangan. World bank mengatakan bahwa korupsi adalah setiap transaksi yang dilakukan antara pelaku sektor swasta dan sektor publik secara ilegal dan di transformasikan menjadi keuntungan pribadi (World Bank, 1997).

Bertolak dari berbagai argumen yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu dan literatur yang ada mengenai pentingnya penyalarsan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan serta pemberantasan korupsi, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pengaruh dari korupsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di negara berpendapatan menengah atas di ASEAN.

## LANDASAN TEORI

### Teori Korupsi

Maslow membagi hirarki kebutuhan manusia menjadi lima tingkat piramida. Dimulai dari kebutuhan dasar yang berkaitan dengan sandang dan pangan (*physical needs*). Di piramida kedua ada kebutuhan akan keamanan yang terdiri dari perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial (berkelompok, bermasyarakat, berbangsa) yang disebut sebagai *security needs*. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan merupakan kebutuhan ketiga disebut *social needs*. Kemudian setelah ada pengakuan sosial, akan ada tambahan kebutuhan berupa ingin dihormati, demokratis, dihargai yang disebut sebagai *esteem needs*. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan sebagai pimpinan, baik direktur, walikota atau pun sebagai kepala Negara, agar dihormati, dipatuhi oleh bawahannya (Andjawati, 2015). Jika kebutuhan tertinggi ini dianggap oleh seseorang sebagai kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dilakukannya untuk mencapainya, termasuk dengan melakukan tindakan korupsi. Sehingga Maslow berpendapat bahwa tingkatan kebutuhan inilah yang mendorong terjadinya perilaku korupsi (Ginting, 2018).

Teori lainnya disampaikan oleh Klitgaard, yang berpendapat bahwa korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak disertakan dengan transparansi atau akuntabilitas. Sehingga teori korupsi Klitgaard juga dikenal dengan teori CDMA yang merupakan formulasi dari (Waluyo, 2014):

$$\text{Corruption (C)} = \text{Directionary (D)} + \text{Monopoly (M)} - \text{Accountability (A)}$$

### Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi secara umum terdiri dari teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Analisa teori pertumbuhan ekonomi klasik, bersumber pada adanya efektivitas mekanisme pasar bebas. Sedangkan analisa teori ekonomi klasik yang kemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo dan W.A Lewis, menyatakan pentingnya ikut campur pemerintah dalam perekonomian agar kegagalan pasar bebas bisa diatasi. Teori pertumbuhan ekonomi lainnya disampaikan oleh Harrod-Domar yang mengemukakan bahwa dalam jangka pendek harus ada pengeluaran



investasi (I) yang dapat mempengaruhi permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) melalui kapasitas produksi. Investasi dalam jangka panjang dapat menambah stok modal (K). Harrod-Domar menyatakan jika setiap tambahan stok modal masyarakat meningkatkan, maka kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output akan tinggi, tetapi tergantung pada jumlah permintaan agregat (Ma'ruf et al, 2008).

### Konsep Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang cepat justru akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan tinggi, karena tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Jika pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, maka jumlah pengangguran lebih banyak dan penduduk yang tidak menerima pendapatan/upah akan meningkat, sehingga akan timbul ketimpangan/gap antara si kaya dan si miskin (Hariani, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terlihat mencolok dalam masyarakat.

Cara yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara lain dengan menghitung Indeks Gini, Teori Distribusi Pendapatan Kaldor, Teori Kuznet dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Indeks Gini merupakan cara mengukur ketimpangan dengan mendistribusikan pendapatan dengan koefisien 0 yang artinya pendapatan merata dan koefisien 1 yang berarti terjadi ketimpangan pendapatan. Kaldor mengklasifikasikan kelompok masyarakat kapitalis dan buruh. Masing-masing kelompok mempunyai *prosperity to save* yang berbeda. Teori Kuznet memberikan hipotesis tentang hubungan pertumbuhan ekonomi suatu Negara dengan ketimpangan distribusi antar penduduk berbentuk U terbaik (Damanik et al, 2018; Subrata 2018).

## METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Objek penelitian ini adalah negara-negara yang tergolong dalam kategori negara berpendapatan menengah keatas (*Upper Middle Income*) yang termasuk dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai instansi. Data yang digunakan adalah data pada periode tahun 2010 sampai tahun 2018. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu ketimpangan pendapatan (Y), pertumbuhan ekonomi ( $x_1$ ) dan korupsi ( $x_2$ ). Untuk data pertumbuhan Ekonomi bersumber dari *World Bank*, data indeks persepsi korupsi bersumber dari *Transparency International*, dan indeks gini bersumber dari *World Income Inequality Database* (WIID).

Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa regresi panel. Analisis ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari  $x_1$  dan  $x_2$  terhadap Y. Dalam perhitungan data ini dilakukan dengan bantuan program Eviews 9. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Model data panel juga dapat meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang artinya meningkatkan efisiensi. Terdapat beberapa keunggulan dari metode ini yaitu (Baltagi, 2005):

1. Data panel mampu mengontrol atau menangkap heterogenitas individu. Data panel menganggap tiap – tiap observasi seperti individu, perusahaan, negara adalah heterogen.



2. Data panel mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, tingkat variabilitas yang lebih tinggi, kolinearitas antar variabel berkurang, derajat bebas yang lebih banyak, dan lebih efisien.
3. Data panel lebih mampu melihat dinamika data. Selain bisa menangkap perbedaan antar individu, data panel juga mampu membandingkan kondisi individu tersebut pada suatu periode dengan periode lainnya.
4. Data panel lebih bisa mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak mampu dideteksi oleh *cross section* murni atau *time series* murni.
5. Data panel mampu membangun dan menguji model yang lebih rumit dibandingkan dengan data *cross section* murni atau *time series* murni.
6. Data panel mikro yang digabungkan seperti individu, perusahaan dan rumah tangga akan lebih akurat diestimasi dibandingkan dengan variabel yang mirip yang diukur pada level makro.
7. Data panel makro dilain pihak memiliki data deret waktu yang lebih panjang tetapi uji unit rootnya memiliki distribusi asimtotik standar (*standard asymptotic distributions*).

Model persamaan regresi panel pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Gini}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{COR}_{it} + \beta_2 \text{EG}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

dimana:

$\text{Gini}_{it}$  = Indeks ketimpangan distribusi pendapatan di negara  $i$  pada periode  $t$

$\text{COR}_{it}$  = Indeks persepsi korupsi di negara  $i$  pada periode  $t$

$\text{EG}_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi di negara  $i$  pada periode  $t$

$\beta_0$  = Konstanta/intersept

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi pada masing – masing variabel bebas

$\varepsilon_{it}$  = error term di negara  $i$  pada tahun  $t$

Selanjutnya, ada beberapa langkah yang akan dilakukan yaitu pemilihan model terbaik dengan melakukan pengujian Chow, Hausman, dan *Lagrange Multiplier*. Selain itu juga model akan di uji asumsi klasik berupa normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Meskipun uji asumsi klasik ini bukanlah merupakan suatu kewajiban bagi persamaan model regresi data panel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja ekonomi suatu negara akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berorientasi pada stimulasi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara berpendapatan menengah atas di kawasan Asia Tenggara yang terus berbenah untuk melaju menjadi negara maju. Namun perjalanannya masih cukup jauh, karena mereka masih dihadapkan pada persoalan mendasar seperti korupsi yang masih tinggi, perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan yang melebar.

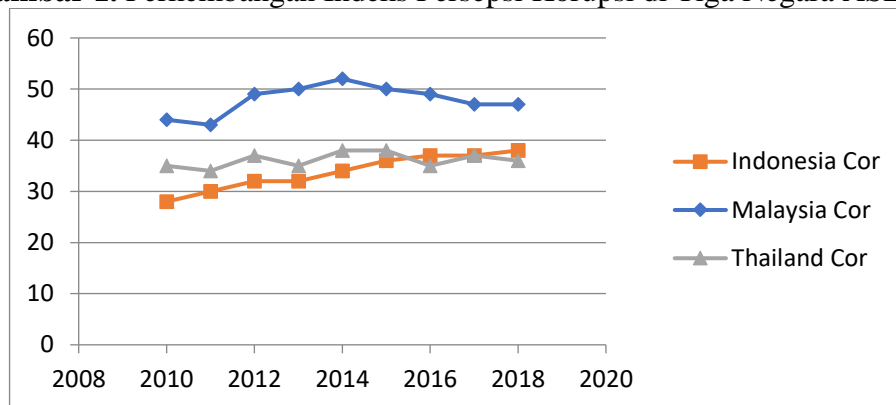
### Gambaran Umum Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan

Korupsi merupakan tindakan yang tidak bermartabat karena menipu orang banyak atau negara demi memuaskan kepentingan pribadi. Celah-celah korupsi yang dibiarkan akan memperburuk perekonomian secara umum. Untuk melihat besaran korupsi suatu negara maka perlu ada pengukuran yang dilakukan, salah satunya adalah melalui *Corruption Perception Index* atau indeks persepsi korupsi. Indeks ini digunakan untuk melihat seberapa bersih suatu negara dari korupsi. Indeks persepsi korupsi berada pada rentang 0-100, dimana semakin besar skor berarti semakin bersih dari korupsi. Indonesia,



Malaysia, dan Thailand sebagai negara *upper middle income* di ASEAN memiliki indeks dibawah 60 poin.

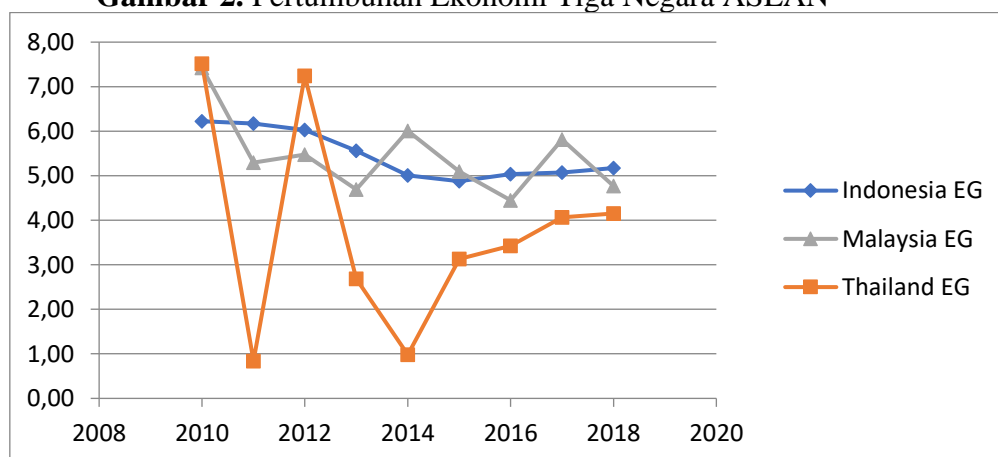
**Gambar 1.** Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi di Tiga Negara ASEAN



Sumber: Transparency International, 2020.

Berdasarkan Gambar 1, dari ketiga negara *Upper Middle Income* di ASEAN, Malaysia merupakan negara yang paling baik dalam pengendalian tindak korupsi yang dicerminkan dengan indeks persepsi korupsi tertinggi meski mengalami tren menurun dimulai dari tahun 2014 namun tetap masih berada diatas negara Indonesia dan Thailand. Sementara, Indonesia meski masih belum mampu mencapai nilai indeks korupsi terbaik, namun dalam perkembangannya memperlihatkan adanya tren perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan semakin membaiknya lembaga dan instansi publik dari tahun ke tahun. Meskipun demikian Indonesia masih berada di bawah Malaysia. Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat 4 di ASEAN, posisi pertama masih dipegang Singapura (<https://www.cnnindonesia.com/>). Thailand apabila dilihat dari Gambar 1 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

**Gambar 2.** Pertumbuhan Ekonomi Tiga Negara ASEAN



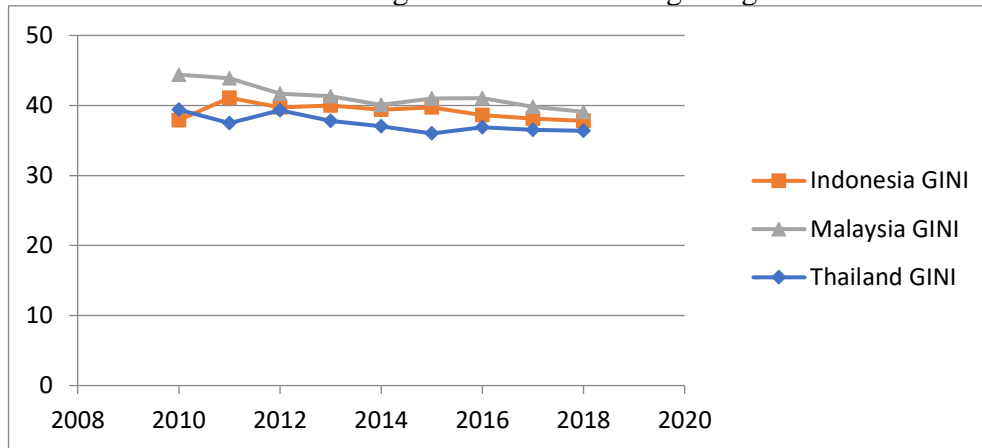
Sumber: World Bank, 2020.

Sementara, pertumbuhan ekonomi dengan kebermanfaatnya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat suatu negara, diantaranya yaitu (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi; (2) mendorong pinjaman pemerintah lebih rendah; (3) memacu peningkatan layanan publik; (4) mengundang peningkatan investasi; (5) semakin berkembangnya



inovasi dan penelitian; dan (6) sebagai bentuk evaluasi pembangunan ekonomi, pada ketiga negara tersebut pergerakan pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, tampak bahwa dalam empat tahun terakhir Indonesia dan Thailand mengalami perbaikan dalam pertumbuhan ekonominya.

**Gambar 3.** Perkembangan Indeks Gini di Tiga Negara ASEAN



Sumber: *World Income Inequality Database (WIID)*, 2020.

Selanjutnya, untuk melihat ketimpangan pendapatan disuatu negara melalui pendekatan Indeks Gini. Indeks ini digunakan sebagai acuan untuk melihat besaran perbedaan pendapatan antar penduduk disuatu negara. Semakin besar angka Indeks Gini menunjukkan semakin tidak merata distribusinya, begitupun sebaliknya semakin mendekati angka nol maka semakin merata distribusinya. Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang merupakan negara *upper middle income countries* di ASEAN memiliki poin yang berada dibawah 50 yang menandakan tingkat ketimpangan pendapatan sedang. Thailand merupakan negara yang lebih merata distribusi pendapatannya dibandingkan Indonesia dan Malaysia. Sementara Malaysia merupakan negara yang paling tidak merata dibandingkan kedua negara lainnya.

### Analisis Hasil Regresi

Untuk memperoleh pembuktian mengenai pengaruh korupsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di tiga negara ASEAN, maka terlebih dahulu melakukan pemilihan model terbaik yang akan diaplikasikan dalam estimasi persamaan. Pengujian dilakukan untuk membandingkan antara model *common effect* dan *fixed effect* dengan uji chow, dan diperoleh hasil model *fixed effect* yang terpilih, lalu dilanjutkan dengan membandingkan ke model *random effect*, di peroleh hasil model *fixed effect*. Dengan adanya hasil tersebut, maka tidak perlu dilanjutkan ke pemilihan antara *random effect* dan *common effect* sebagai model terbaik, sehingga pengujian lagrange multiplier dapat ditiadakan. Berdasarkan hasil uji maka terpilihlah *fixed effect model* sebagai model terbaik dalam penelitian ini. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.1.



**Tabel 4.1** Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik

No	Jenis Uji	Model		
		CEM	FEM	REM
1	Uji Chow		✓ (Cross-section Chi-square = 0.0001)	
2	Uji Hausman			(Cross-section random = 0.0000)
Metode Terpilih			✓	

Sumber: Hasil olah data, 2020

Berdasarkan pemilihan model terbaik yaitu *fixed effect*, didapatkan hasil sebagaimana tertera pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Hasil Regresi Panel

Variabel	Koefisien	Std.Error	t-Statistik	Prob.
C	45.44169	3.752766	12.10885	0.0000
COR	-0.199504	0.088930	-2.243392	0.0353
EG	0.347924	0.165058	2.107886	0.0467
Adjusted R-squared	0.693864			
Prob(F-statistic)	0.000003			

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan hasil analisa diatas secara umum variabel EG (*Economic Growth*) dan COR (*Corruption Perception Index*) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen GINI, yang dilihat dari angka  $\alpha < 5\%$  atau  $\alpha < 0.05$ . Artinya ketimpangan pendapatan yang terjadi pada *upper middle income countries* di ASEAN secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan korupsi.

### Korupsi dan ketimpangan pendapatan

Korupsi memberikan andil dalam memperparah ketimpangan pendapatan. Penguasaan sumber ekonomi oleh kelompok masyarakat tertentu menyebabkan ketimpangan semakin memburuk. Dari hasil empiris dipertegas mengenai hubungan antara korupsi dan ketimpangan. Indeks persepsi korupsi yang digunakan sebagai ukuran besaran korupsi memberikan tanda hubungan negatif. Hasil ini dapat diterjemahkan bahwa setiap penambahan 1 poin pada indeks persepsi korupsi akan mengurangi ketimpangan sebesar 0.19 atau 20% karena semakin besar poin indeks persepsi korupsi maka semakin bersih negara tersebut. Semakin tinggi korupsi maka akan semakin besar ketimpangan yang terjadi. Korupsi yang tidak ditanggulangi dengan baik akan menyebabkan masyarakat mengalami jurang perbedaan pendapat yang lebih dalam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chetwynd (2004) bahwa korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat. Senada dengan Chetwynd, Batabyal dan Chowdhury (2015) menemukan bahwa semakin rendah tingkat korupsi pada suatu negara maka mendorong ketimpangan pendapatan pada tingkat yang lebih rendah.

Meskipun secara deskriptif yang tertuang dalam gambar 1 dan 3 terlihat bahwa tingkat indeks persepsi korupsi Malaysia tertinggi diantara ketiga negara dan pada saat





yang bersamaan ketimpangan Malaysia juga tertinggi diantara ketiga negara, namun ketika dilakukan pengujian secara empiris menunjukkan arah yang terbalik. Fakta ini sepertinya menunjukkan kontradiktif, namun sesungguhnya tidaklah demikian, karena angka persepsi korupsi di Malaysia masih dibawah 60 dan ini relatif rendah dibandingkan dengan negara seperti Singapura.

Beban yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap penghasilan akan berbeda pada setiap individu. Individu yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah akan merasakan dampak yang lebih tinggi daripada individu yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tanzi (1998), korupsi mendistorsi peran redistributif pemerintah. Penekanan pentingnya dalam menangani korupsi juga disampaikan oleh Gupta, dkk (2002), dengan menggunakan sampel kecil dari beberapa negara, menemukan hubungan positif dan linier antara korupsi dan ketimpangan pendapatan, pernyataannya menegaskan bahwa korupsi yang tinggi dan semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Disimpulkan bahwa kebijakan mengurangi korupsi berpeluang besar untuk mempersempit celah ketimpangan pendapatan dimasyarakat.

Indonesia, Malaysia, dan Thailand memahami benar bahwa korupsi seperti rayap yang menggerogoti perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya dalam mengendalikan dan memberantas tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Otoritas yang menangani tindak korupsi diberi ruang lebih dengan adanya hak independensi dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan adanya lembaga independen yang bertugas dalam upaya pemberantasan tindak korupsi maka ketiga negara ini mengalami pemulihan dalam penilaian kinerja pemberantasan korupsinya yang terlihat dari semakin baiknya nilai indeks persepsi korupsi yang dicatatkan setiap tahunnya. Kebijakan yang diterapkan di ketiga negara *middle income* di ASEAN ini mewujudkan sebagai bentuk pemahaman dari berbagai hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi yang menganalisa dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan (Li, Xu, dan Zou, 2000; dan Chong dan Calderon, 2000a dan 2000b). Dengan menggunakan data dari berbagai kelompok negara yaitu kelompok negara berpendapatan rendah, dan berpendapatan tinggi, mereka menemukan hubungan U terbalik antara korupsi dan ketimpangan pendapatan. Hasil studi mereka menampilkan dua hal yang berbeda sesuai dengan kelompok negaranya, terdapat hubungan yang positif antara korupsi dan ketimpangan pendapatan pada kelompok negara berpendapatan tinggi dan hubungan negatif dinegara berpendapatan rendah. Dari beberapa studi yang menyoroti potensi korupsi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan, maka dapat ditampilkan gambaran besar bahwa korupsi mendorong semakin lebarnya jurang pendapatan dimasyarakat dengan mempengaruhi distribusi pendapatan, penggunaan aliran bantuan dan pengambilan kebijakan dalam pengeluaran publik.

### **Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan**

Keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sesungguhnya dapat ditinjau dari dua sudut pandang menurut literatur empiris yang mengkaji hal ini. Pertama, literatur yang mengikuti hasil pemikiran Kuznet dan Lewis yang pesimistik dengan pendugaan bahwa proses pertumbuhan dan pembangunan bagaimanapun juga membutuhkan peningkatan ketimpangan, setidaknya pada tahap awal. Kedua, kajian yang berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan (misalnya, Barro dan Sala-i-Martin, 1995; Li, Squire, dan Zou, 1998). Beberapa studi menampilkan temuan yang menyatakan



pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengurangi ketimpangan pendapatan (Barro, 2000; Panizza, 2002; Bhanumurthy dan Mitra, 2004; dan Kurniasih, 2017).

Namun studi ini menghasilkan hal yang berbeda yaitu terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 1 persen akan diikuti oleh peningkatan ketimpangan sebesar 34,8 persen. Hubungan positif ini sesungguhnya bukanlah hal yang mengherankan, karena dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu memperlihatkan adanya keselarasan pergerakan diantara kedua variabel ini. Sebagaimana yang ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamanda (2021) pada 50 negara dalam rentang 2000 sampai dengan 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi mendorong ketimpangan pendapatan semakin tinggi pula.

Diperkuat oleh pernyataan dari Todaro (2006) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, disebabkan ketika terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya segelintir orang yang dapat menikmatinya. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand masih tergolong pertumbuhan semu. Artinya, meskipun secara global terjadi peningkatan output, tetapi yang menikmatinya adalah golongan masyarakat yang menguasai sumber daya. Pertumbuhan ekonomi yang bagus apabila mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, dan ini dapat terwujud apabila tingkat upah terendah yang dibayarkan naik lebih cepat dari upah rata-rata, tunjangan pemerintah seperti jaminan kesehatan dan pensiun meningkat sesuai dengan upah rata-rata, pertumbuhan ekonomi mendorong terciptanya lapangan kerja baru, upah minimum dinaikkan sejalan dengan pendapatan rata-rata, berjalannya peran dari pajak progresif yang ditetapkan.

Lebih lanjut, ditegaskan oleh Forbes (2000) pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berhubungan positif dalam jangka pendek dan jangka menengah. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara mungkin terjadi. Sebagai alasan dari hubungan positif ini adalah hipotesa Kuznet (1955), dalam kurva U terbalik diilustrasikan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pertama-tama akan mulai meningkat, kemudian seiring perkembangan teknologi dan industrialisasi, kota akan tumbuh menjadi magnet ekonomi dan urbanisasi akan terjadi. Orang akan beralih dari yang tadinya bekerja di bidang pertanian akan bermigrasi ke daerah perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Seiring bertumbuhnya kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan output total yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi sekunder dan tersier, ketimpangan tumbuh antara sektor perkotaan dengan produktivitas yang tinggi dan pedesaan yang produktivitasnya rendah, serta sektor dengan upah rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Eeckhout (2014), keberadaan kota-kota besar yang tidak merata merupakan salah satu penjelasan mengapa terjadi hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Saat kota tumbuh, itu cenderung akan menarik perhatian yang tidak proporsional antara rumah tangga yang berada pada tingkat pendapatan atas dan rumah tangga berpendapatan bawah, sehingga distribusi pendapatan seperti ini akan memperburuk ketimpangan. Kondisi inilah yang dialami oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang mana ketiga negara ini memiliki pusat-pusat ekonomi pada kota-kota besar tertentu. Pembangunan belum sepenuhnya merata ke semua daerah sehingga kegiatan ekonominya masih terpusat pada kota-kota tertentu.



## SIMPULAN

Hasil empiris menunjukkan bahwa korupsi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Arah pengaruh korupsi terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif. Hasil ini menjelaskan peningkatan indeks korupsi akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Artinya, korupsi merupakan elemen penting yang dapat digunakan sebagai alat kebijakan dalam mengurangi ketimpangan, karena jika korupsi tidak di mitigasi maka akan memperparah ketimpangan pendapatan. Semakin korupsi suatu negara maka akan semakin timpang pendapatan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terhalangnya distribusi sumber daya ekonomi ke semua lapisan masyarakat akibat adanya praktek korupsi. Oleh karenanya maka penindakan tegas terhadap kasus korupsi yang terjadi sangat diperlukan agar kejeerahteraan masyarakat dapat dinikmati secara merata bukan hanya oleh kelompok tertentu yang menguasai sumber daya dan akses ekonomi.

Sementara, arah pengaruh dari pertumbuhan ekonomi adalah positif, yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin besar ketimpangan pendapatan. Temuan ini sangat penting karena pada umumnya penelitian terdahulu yang ada menunjukkan hasil yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil temuan studi ini mengindikasikan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terbagi dengan sempurna ke masyarakat, sumber-sumber ekonomi masih dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu dinikmati oleh semua kelompok pendapatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda. 2021. The Effect of Economic Growth on Income Inequality: Panel Data Analysis from Fifty Countries. *Info Artha*, 5(1), 1-10.
- Andjarwati, Tri. 2015. Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregir dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 45-54.
- Baltagi, B. H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition, England: John Wiley & Sons Ltd.
- Barro, R. J. 2000. Inequality and growth in a panel of countries. *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5-32.
- Batabyal, S. dan Chowdhury, A. 2015. Curbing Corruption, Financial Development and Income Inequality. *Progress in Development Studies*, 15(1), 49-72.
- Bhanumurthy, N., & Mitra, A. 2004. Economic growth, poverty, and inequality in Indian States in the prereform and reform periods. *Asian Development Review*, 21(2), 79-99.
- Cingano, F. 2014. Trends in income inequality and its impact on economic growth. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 163.
- Chong, A. and Calderon, C. (2000a). Institutional Quality and Income Distribution. *Economic Development and Cultural Change*, 48: 761-786.
- Chong, A. and Calderon, C. 2000b. Institutional Quality and Poverty Measures in a Cross-Section of Countries. *Economics of Governance*, 1: 123-135.
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., Spector, B. 2003. *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*, Washington: Management System International.



- Coudouel, A., Dani, AA. dan Paternostro, S. 2006. *Poverty and Social Impact Analysis of Reforms*, Washington: The World Bank.
- Damanik, Anggiat Mugabe, Zulgani dan Rosmeli. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15-25.
- Dartanto, T., Meliyawati, M., dan Sofiandi, Y. 2016. Good Intention Bad Outcome: Social Assistance, Corruption and Inequality in Indonesia. Paper presented at Southeast Asia Conference at Oxford University.
- Eeckhout, J., Pinheiro, R., & Schmidheiny, K. 2014. Spatial Sorting. *Journal of Political Economy*, 122(3), 554-620.
- Forbes, K. 2000. A Reassessment of the relationship between inequality and growth. *American Economic Review*, 90, 869- 887.
- Fisman, R., dan Miguel, E. 2008. *Economic Gangsters: Corruption, Violence, and the Poverty of Nation*, New Jersey: Princeton University Press.
- Frank, M. W. 2009. Inequality and growth in the united states: evidence from a new state-level panel of income inequality measures. *Econ. Inq.*, 47,55-68.
- Ginting, Philia Anindita. 2018. Implementasi Teori Maslow dan Peran Ganda Pekerja Wanita K3L Universitas Padajajaran. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 220-233.
- Gupta, S., Davoodi, H. and Alonso-Terme, R. 2002. Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? *Economics of Governance*, 3: 23-45.
- Hariani, Ermatry. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal of Applied Business*, 3(1), 13-23.
- Huang, H. C. R., Fang, W., Miller, S. M. and Yeh, C. C. 2015. The effect of growth volatility on income inequality. *Economic Modelling*, 45, 212– 222.
- Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Kurniasih, Erni Panca. 2017. Effect of Economic on Income Inequality, Labor Absorption, and Welfare. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 181-188.
- Li, H., Xu, L.C., and Zou, H. F. 2000. Corruption, Income Distribution, and Growth. *Economics and Politics*, 12: 155-182.
- Ma'ruf Ahmad dan Latri Wihastusi. 2008. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.
- Meon, PG., dan Sekkat, K. 2005. Does corruption grease or sand the wheel of growth?. *Public Choice*, 122 (1-2), 69-97.
- Mo PH. 2001. Corruption and Economic Growth. *Journal of Comparative Economics*, 29, 66- 79.
- Negin, V., Zakariah, A R., dan Nikopour. 2010. The Causal Relationship between Corruption and Poverty: A Panel Data Analysis. *MPRA Paper*, No.24871, pp.1-13.
- Panizza, U. 2002. Income inequality and economic growth: evidence from American data. *Journal of Economic Growth*, 7, 25-41.
- Rubin, A. and Segal, D. 2015. The effects of economic growth on income inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*, 45, 258–273.
- Sen, A. 1993. *Capability and well-being*. In M Nussbaum & A Sen (Eds.), *The quality of life*. Oxford: Oxford University Press.
- Subrata, Bakhtiar Al Yunussy. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1), 4-13.
- Sumah, S. 2018. Corruption, *Causes and Consequences*, chapter 5 in Vito Bobek (ed), Trade and Global Market, Intechopen. pp 64-79.



- Tanzi, V. 1998. Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. *IMF Staff Papers*, 45: 559-594.
- Therborn, G. 2013. *The killing fields of inequality*. Cambridge: Polity Press.
- Todaro, MP., dan Smith, SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, edisi kesembilan, Jakarta: Erlangga.
- Wahiba, N. F. and El-Weriemmi, M. 2014. The relationship between economic growth and income inequality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 4(1):135–143.
- Waluyo, Bambang. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), hal 169-182.
- Widarjono, A. 2009. *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*, Yogyakarta: Ekonisia.
- World Bank. 1997. *Helping Countries Combat Corruption*. The Role of the World Bank, Pp-8.
- Yamamura, E., Andres, AR., dan Katsaiti, MS. 2012. Does Corruption Affect Suicide? Econometric Evidence from OECD Countries. *Atlantic Economic Journal*, 40, 133-145.



